



PROSIDING

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tema:

“Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Diseminasi Hasil Penelitian Terapan”

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Lampung, 15 November 2018

ISBN 978-602-53436-0-5



Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2018

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Tema:

“Pengabdian Pada Masyarakat Melalui Desiminasi Hasil - Hasil Penelitian Terapan”

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
Pengarah : Dr. Mahrinasari, S.E., M.SBA
Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si.Akt
Dr. Ambya, S.E., M.Si
Dr. Nairobi, S.E., M.Si
Dr. Farichah, S.E., M.Si.Akt
Dr. RR Erlina, S.E., M.Si

Pelaksana

Ketua : Dr. Marselina, S.E., MPM
Wakil Ketua : Prayudha Ananta, S.E., M.M
Sekretaris : Usep Syaipudin ,S.E., M.Si
Wakil Sekretaris : Afri,S.E.,MM
Bendahara : Emi Maimunah, S.E., M.Si
Seksi-Seksi

Sie Acara Semnas : Ninuk ,S.E., M.Si.Akt
Sie Kesekretariatan : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc
Sie Prosiding : Sahidin, S.E
Sie Management /Panel Class : Zainur M.Rusdi, S.E., M.Si
Dina, S.E., M.Si

Sie Penerimaan Artikel Koordinator : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si
Akuntansi : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si
Yunia

Manajemen : Dwi Asri, S.E., M.Si
Yuniarti Fihartini, S.E., M.M

Ekonomi Pembangunan : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si
Pendukung Kesekretariatan : Mimi Efitia Gusmiati, S.E
Elvi, S.E., M.M

Penyunting : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si
Dr. Erni Hendrawati, S.E., M.Si
Dr. Rindu Ekagamayuni, S.E., MSi.Akt
Dr.Lies Maria Hamzah, S.E., M.E
Dr. Ida Budiarti, S.E., M.E

Penerbit

FEB, Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.01 Bandar Lampung

Telp : 0721-704622

Website : feb.unila.ac.id

**Penyuluhan, Pelatihan Dan Pendampingan
Pemeriksaan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Untuk Meningkatkan Kemandirian Koperasi
Di Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung**

Dr. Farichah, R. Weddie A, Ninuk Dewi K, Dr. Rr. Erlina

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian lembaga koperasi dengan melakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan penerapan sistem akuntansi dan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit) bagi anggota badan pengawas lembaga koperasi di kota Bandar Lampung, propinsi Lampung. Berdasarkan pengamatan dan analisis situasi yang dilakukan maka dapat diidentifikasi permasalahan bahwa anggota badan pengawas koperasi belum berfungsi dengan baik, yang bisa dilihat dari proses dan kualitas pelaporan keuangan yang disajikan, yang mengakibatkan rendahnya kemandirian koperasi dalam persaingan usaha dengan lembaga ekonomi yang lain. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi solusi yang ditawarkan adalah penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan penerapan sistem akuntansi dan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit) atas laporan keuangan koperasi. Dengan demikian maka diharapkan anggota badan pengawas koperasi dapat berperan aktif dalam pengendalian keuangan, sehingga koperasi dapat terus beroperasi dengan sehat dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan unit-unit usaha lainnya di pasar.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, dan Pemeriksaan Keuangan

LATAR BELAKANG

Lembaga koperasi sejak awal diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat, yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamai keberadaab koperasi. Lembaga koperasi diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia, karena bertujuan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya.

Seringkali koperasi dimaknai dengan hanya sebagai koperasi dalam nama saja. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang dimengerti oleh anggota.

- b. Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya sulit dimengerti dan dikendalikan, dan kompleksitas organisasi sangat tinggi.
- c. Tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota yang terlalu sempit.
- d. Koperasi dijalankan sebagai tanggapan atas kepentingan manajer atau para pemimpin lainnya, atau sebagai tanggapan atas kepentingan dan arahan dari pemerintah.
- e. Koperasi terbuka juga bagi non-anggota dan usaha non-anggota ini mungkin justru akan menyerap sebagian sumber daya penting koperasi.

Lembaga koperasi dalam perjalanannya memiliki perkembangan organisasional yang kurang berarti atau kurang signifikan, meliputi baik struktur maupun kinerja yang dicapai. Secara kelembagaan, koperasi memiliki jumlah anggota yang cukup. Kondisi ini tidak dibarengi dengan

hasil yang diperoleh dari aktivitas usaha yang memadai. Menurut petugas dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Lampung, jumlah koperasi di Kota Bandar Lampung yang masih bertahan hidup kurang dari 50%, jika dibandingkan dengan jumlah ijin pendirian yang diberikan. Ijin pendirian koperasi yang ada di Kota Bandar Lampung sampai saat sekarang berjumlah 839, terdiri dari; 1) 736 untuk koperasi primer kabupaten/kota, 2) 83 untuk koperasi primer propinsi, dan 3) 20 untuk koperasi sekunder propinsi. Tabel 1 berikut menggambarkan jumlah lembaga koperasi yang aktif di kota Bandar Lampung.

Tabel 1: Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2017

No	Keterangan	Jml Ijin BH	Jml Aktif	Jml Pasif
1	Koperasi Primer (Kota)	736	350	386
2	Koperasi Primer (Propinsi)	83	12	71
3	Koperasi Sekunder (Propinsi)	20	5	15
Jumlah		839	367	472

Capaian kinerja atau rasio perbandingan antara sisa hasil usaha atas total harta yang dimiliki (*Return on Assets* - ROA) dari lembaga koperasi yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung digambarkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2: Capaian Kinerja (ROA) Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2017

No	Keterangan	ROA	ROA	ROA
----	------------	-----	-----	-----

		Min	Maks	Rata-rata
1	Koperasi Primer (Kota)	-9.833	66.37	10.73
2	Koperasi Primer (Propinsi)	0.091	8.261	3.286
3	Koperasi Sekunder (Propinsi)	-14.081	8.706	0.276

Tabel 2 di atas menggambarkan walaupun rata-rata ROA untuk koperasi primer sebesar 10,731 %, akan tetapi masih ada lembaga koperasi yang memiliki ROA negatif. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan kerja keras dari semua perangkat organisasi lembaga koperasi, termasuk tuntutan perhatian dari badan pengawas (BP). Jika kondisi kinerja lembaga koperasi dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan, maka kemungkinan yang terjadi adalah lembaga koperasi benar-benar hanya tinggal nama alias *vacum* tanpa kegiatan ekonomi yang berarti.

Seperti dijelaskan di atas, pengelolaan lembaga koperasi tidak dapat dilepaskan dari peran penting perangkat koperasi seperti yang ditetapkan dalam pasal 21 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal tersebut menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari : 1) Rapat Anggota, 2) Pengurus, dan 3) Pengawas. Dalam pengelolaan lembaga koperasi fungsi pengawasan dilimpahkan kepada Badan Pengawas (BP). Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh anggota BP, seharusnya menekankan perlunya menerapkan prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan koperasi yang dijalankan oleh

pengurus (dan manajer) koperasi. Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi pemborosan terhadap sumber daya yang dimiliki. Selain itu, anggota BP harus menggunakan standar penilaian terhadap kinerja pengurus (dan manajer) koperasi secara profesional, sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) yang mengkaji dan menelaah setiap kelemahan, hambatan, atau keunggulan serta peluang yang dimiliki oleh lembaga koperasi, kemudian melakukan evaluasi terhadap setiap program yang telah disyahkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Pengawasan juga dilakukan dengan pengkajian dan penelaahan atas ketertiban administrasi yang dijalankan, baik administrasi keuangan, administrasi karyawan, administrasi berbagai perjanjian/perikatan yang dibuat oleh lembaga koperasi dengan anggota dan pelanggan. Agar tujuan pengawasan bisa dijalankan dengan baik dan mencapai sasaran, anggota BP juga harus memahami bagaimana sistem akuntansi yang berjalan dan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, maka proses pelaksanaan fungsi pengawasan oleh anggota BP bisa dilakukan secara objektif dan menghindarkan diri dari pengawasan yang bersifat subjektif serta tidak keluar dari tugas dan kewenangan sebagai pengawas koperasi.

Banyak pihak mengetahui tentang apa itu koperasi dan bagaimana seharusnya koperasi dikelola. Akan tetapi pengetahuan apa dan bagaimana koperasi tersebut, belum tentu dimaknai dengan pemahaman yang sama. Hal ini bisa dilihat dari pengelolaan lembaga koperasi, yang menggambarkan peran yang sangat dominan dari para pengurus termasuk manajer koperasi, tanpa memberdayakan peran dan fungsi pengawasan, yang menjadi kewenangan dari

anggota BP. Pada umumnya peran anggota BP dianggap sebagai peran yang tidak penting. Hal ini bisa terjadi karena anggota BP memiliki kemampuan dan pemahaman yang sangat terbatas tentang bagaimana kegiatan operasional yang seharusnya dijalankan oleh lembaga koperasi.

1. Permasalahan Mitra

Berdasarkan pengamatan dan survey yang dilakukan di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan anggota BP (Badan Pengawas) dan sumber daya manusia di lingkungan lembaga koperasi pada umumnya masih rendah.
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota BP dalam perencanaan dan pengendalian dalam usaha yang dikelola oleh lembaga koperasi.
- c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota BP tentang sistem akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan.
- d. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota BP dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan lembaga koperasi, terutama di bidang pemeriksaan keuangan.

3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan penerapan sistem akuntansi dan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit) bagi anggota badan pengawas lembaga koperasi di kota Bandar Lampung, propinsi Lampung ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra dalam melakukan proses akuntansi secara manual, dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra dalam menjalankan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit), sehingga

diharapkan kegiatan ini mampu memberikan bantuan kepada anggota BP, sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan sebagai pengendali terhadap semua kegiatan ekonomi, yang mendorong tercapainya kemandirian koperasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN SOLUSI DAN TARGET LUARAN

1. Tinjauan Pustaka

Unit usaha koperasi merupakan unit usaha yang dirancang dapat mengelola sumberdaya bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian koperasi diharapkan dapat berperan aktif sebagai pendukung perekonomian masyarakat. Akan tetapi pertumbuhan unit usaha koperasi di Indonesia menghadapi banyak kendala, sehingga mengalami pertumbuhan yang kurang menyenangkan, yang tidak disertai dengan kemajuan secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena koperasi tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa lembaga koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dan peranannya secara efektif dalam menciptakan kemakmuran masyarakat secara luas.

Perkembangan jumlah koperasi yang berdiri, modal maupun anggotanya merupakan bukti bahwa keberadaan koperasi dalam perekonomian memiliki sumbangan yang positif, sehingga diharapkan koperasi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi rakyat melalui penyediaan barang dan jasa yang murah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi perkembangan koperasi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya dalam pengelolaan operasional, sehingga lembaga koperasi tidak dapat menangkap

kesempatan dalam memberikan kontribusinya untuk ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga perekonomian, koperasi seharusnya memiliki peran penting dalam pembangunan. Kondisi ini menuntut pengelolaan lembaga koperasi dilakukan dengan benar dan profesional untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Secara umum koperasi seringkali menghadapi permasalahan yang bersifat internal dan eksternal. Permasalahan internal antara lain : 1) kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi masih lemah, 2) lemahnya koperasi dalam mengakses permodalan, 3) keterampilan manajerial kurang bisa bersaing dengan pelaksana lembaga ekonomi lainnya, 4) jaringan pasar yang masih relatif terbatas, 5) pemilikan dan pemanfaatan perangkat teknologi produksi dan informasi yang belum memadai.

Permasalahan eksternal yang dihadapi lembaga usaha koperasi antara lain : 1) kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam struktur ekonomi nasional yaitu dengan dikuasainya sebagian besar aset usaha nasional dan kelompok usaha besar, 2) sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan terhadap lembaga koperasi masih kurang efektif. Persoalan ini, baik internal maupun eksternal, menyebabkan koperasi mengalami peningkatan kinerja yang stagnan (tidak berarti). Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang masih dapat bertahan hidup dalam dunia usaha.

Pengelolaan koperasi sebenarnya sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah. Akan tetapi, karena banyaknya kendala yang dihadapi dalam dunia usaha, maka kelangsungan hidup lembaga koperasi sangat sulit untuk dipertahankan. Salah satu kendala yang dimaksudkan adalah kualitas sumber daya

manusia dari pengelola koperasi yang masih lemah. Pengelolaan koperasi dilakukan oleh Pengurus dan Badan Pengawas (BP) koperasi. Biasanya peran pengurus lebih bersifat dominan dibandingkan dengan peran BP. Peran BP diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin secara internal atas kinerja pengurus koperasi. Pengawasan dan pemeriksaan ini ditujukan sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian atas semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Dengan demikian pengurus koperasi akan selalu bertindak sesuai dengan rencana yang diputuskan atas anggaran dasar dan rumah tangga yang telah ditetapkan.

Sebagai pengawas dan pemeriksa kinerja pengurus koperasi, anggota BP harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kewajiban yang diembannya. Selama ini, anggota BP hanya ada namanya saja, kurang diberdayakan keberadaannya. Kewajiban dan kewenangan anggota BP diatur dalam pasal 39 Undang-undang, Nomor 25 Tahun 1992, bahwa BP berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sedangkan BP juga berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi serta melakukan evaluasi kinerja pengurus koperasi

Berdasarkan kewajiban dan kewenangan yang dimiliki, dan kondisi kurang berdayanya BP dalam pengelolaan lembaga koperasi, maka kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap anggota BP dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan (audit) perlu dilakukan, sehingga diharapkan memperkuat peran BP dalam rangka ikut serta

meningkatkan kemandirian lembaga koperasi guna menghadapi persaingan dan pengembangan usaha di masa depan.

2. Solusi dan Target Luaran

Solusi yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra direncanakan melalui 2 tahap kegiatan. Tahap I adalah proses peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota BP berkaitan dengan sistem akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan. Tahap II adalah proses peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota BP berkaitan dengan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit). Adapun target luaran dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pemeriksaan keuangan (audit) bagi anggota BP berdasarkan indikator kinerja untuk tahap I dan II, dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini :

Tabel 3: Target Luaran Berdasarkan Indikator Kinerja Tahap I

Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Base line	Target
Penyuluhan dan pelatihan tentang proses akuntansi	1. Tingkat pengetahuan mitra tentang akuntansi (10%)	1. Peningkatan pengetahuan mitra tentang proses akuntansi (90%)
	2. Tingkat keterampilan mitra dalam melakukan proses siklus akuntansi	2. Peningkatan keterampilan mitra dalam melakukan proses siklus

	secara manual (10%)	akuntansi secara manual (90%)
Pembuatan sistem akuntansi secara manual	Tingkat keberhasilan pembuatan sistem akuntansi (10%)	Keberhasilan pembuatan sistem akuntansi (100%)
Demonstrasi pendampingan penyusunan laporan keuangan	Kemampuan mitra dalam menjalankan sistem akuntansi (10%)	Peningkatan kemampuan mitra dalam menjalankan sistem akuntansi (90%)

	proses pemeriksaan keuangan atau audit (10%)	dalam melakukan proses pemeriksaan keuangan atau audit (90%)
Pembuatan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit)	Tingkat keberhasilan pembuatan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (10%)	Keberhasilan pembuatan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (100%)
Demonstrasi pendampingan pelaksanaan dan penyusunan laporan pemeriksaan keuangan (audit)	Kemampuan mitra dalam menjalankan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (10%)	Peningkatan kemampuan mitra dalam menjalankan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (90%)
Evaluasi akhir materi dan evaluasi penggunaan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit)	Kemajuan dalam pemahaman akuntansi, dan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (10%)	Peningkatan kemajuan dalam pemahaman akuntansi, dan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (90%)
Pemantauan khusus untuk keberlanjutan	Keinginan menggunakan sistem dan prosedur	Tingkat keinginan sistem dan prosedur

Tabel 4: Target Luaran Berdasarkan Indikator Kinerja Tahap II

Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Base line	Target
Penyuluhan dan pelatihan tentang proses pemeriksaan keuangan (audit)	1. Tingkat pengetahuan mitra tentang sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (10%) 2. Tingkat keterampilan mitra dalam melakukan	1. Peningkatan pengetahuan mitra tentang sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan atau audit (90%) 2. Peningkatan keterampilan mitra

n	pemeriksaan keuangan atau audit (10%)	pemeriksaan keuangan atau audit (90%)
---	---------------------------------------	---------------------------------------

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka solusi yang ditawarkan meliputi 2 tahap kegiatan, yaitu 1) melakukan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman anggota BP tentang akuntansi, pembuatan sistem akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan, dan 2) penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman anggota BP dalam pemeriksaan keuangan (audit), pembuatan sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit), memperkenalkan dan melakukan demonstrasi, serta melakukan pendampingan audit keuangan dalam praktek. selanjutnya adalah pemeliharaan sistem akuntansi dan prosedur pemeriksaan keuangan (audit), sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengawasan pengelolaan koperasi secara rutin.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Pembuatan Sistem Akuntansi (Tahap I)

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap I ini akan dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap Peningkatan Pengetahuan Akuntansi

- 1) Melakukan evaluasi awal untuk mengetahui pengetahuan peserta tentang akuntansi. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan semacam *pretest*, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta. Kuesioner menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh data tersebut.
- 2) Pemberian materi akuntansi dengan cara ceramah, latihan soal dan studi kasus kepada seluruh peserta. Pemaparan materi

dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai proses akuntansi, pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi, kemudian pentingnya menyusun laporan keuangan (proses akuntansi secara manual).

- 3) Tahap evaluasi. Pada tahap ini peserta diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait pengetahuan peserta mengenai proses akuntansi.

b. Tahap Pembuatan Sistem Akuntansi.

- 1) Mempelajari dan menganalisis sistem pencatatan akuntansi yang sedang berjalan. Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sistem pencatatan akuntansi yang sedang dijalankan oleh mitra.
- 2) Menentukan permintaan pengguna (mitra). Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan mitra untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh mitra berkaitan dengan sistem atau program akuntansi. Secara umum keinginan para pemakai meliputi data (*input*), pemrosesan (*processing*), dan hasil (*output*). Pada tahap ini mitra akan membantu menentukan bagaimana sebaiknya system atau program akuntansi secara manual harus dibuat dan dioperasikan agar sesuai dengan kebutuhan mitra.
- 3) Merancang sistem akuntansi. Pada tahap ini dilakukan penterjemahan keinginan mitra ke dalam sistem pencatatan terhadap bukti-bukti transaksi yang akan dilakukan.
- 4) Membuat sistem akuntansi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi akun-akun dan bagan alur dokumen yang akan digunakan dalam pencatatan bukti-bukti transaksi.

- 5) Memperkenalkan sistem akuntansi. Sistem yang telah selesai dibuat, selanjutnya diperkenalkan untuk dioperasikan oleh mitra. Pada tahap ini pelatihan pengoperasian program dilakukan baik secara tertulis maupun dalam praktek.
- 6) Memelihara sistem akuntansi yang telah dibuat. Pemeliharaan dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan pada kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan yang timbul dalam penggunaan sistem, sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan di masa depan.

2. Peningkatan Pengetahuan Prosedur Pemeriksaan Keuangan (Tahap II)

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap II adalah sebagai berikut:

a. Tahap Peningkatan Pengetahuan Pemeriksaan Keuangan (Audit)

- 1) Melakukan evaluasi awal untuk mengetahui pengetahuan peserta tentang pemeriksaan keuangan. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan *pretest*, dengan menggunakan kuesioner.
- 2) Pemberian materi pemeriksaan keuangan (audit) dengan cara ceramah, latihan dengan praktek mengaudit untuk seluruh peserta. Pemaparan materi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai proses pemeriksaan keuangan, kemudian melakukan analisis terhadap laporan keuangan.
- 3) Melakukan evaluasi akhir, yaitu peserta diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait pengetahuan

peserta mengenai proses pemeriksaan keuangan (audit).

b. Tahap Pembuatan Prosedur Pemeriksaan Keuangan (Audit).

1. Mempelajari dan menganalisis prosedur yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan keuangan. Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari prosedur yang sedang dijalankan oleh mitra.
2. Merancang prosedur pemeriksaan keuangan (audit). Pada tahap ini dilakukan penganalisan terhadap angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran terhadap akun-akun, dan bukti transaksi yang telah didokumentasikan. Pada tahap ini juga disusun kuesioner berkaitan dengan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal lembaga koperasi.
3. Memperkenalkan prosedur pemeriksaan keuangan yang telah selesai dibuat kepada mitra. Pada tahap ini dilakukan pelatihan pengoperasian sistem dan prosedur pemeriksaan keuangan dalam praktek.
4. Memelihara prosedur pemeriksaan keuangan yang telah dibuat.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan Akuntansi

Pada tahap ini dilakukan penyampaian materi kepada mitra yaitu para anggota Badan Pengawas

dari Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Lestari dan anggota Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya. Penyampaian materi dilakukan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) dan pelatihan tentang proses akuntansi, pemisahan kekayaan unit entitas dengan kekayaan pribadi, kemudian pentingnya menyusun laporan keuangan (proses akuntansi secara manual). Sebelum dan sesudah penyuluhan dan pelatihan, dilakukan semacam *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta.

2. Proses Pembuatan Laporan Keuangan

Sebelum membuat laporan keuangan, terlebih dahulu harus menggolongkan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan ke dalam suatu akun tertentu, ini berguna untuk memisahkan dan membedakan jenis transaksi yang terjadi. Misalnya transaksi penjualan tunai, maka nanti transaksi penjualan tersebut dimasukkan ke dalam akun “Kas di tangan” untuk debet, dan dimasukkan ke dalam akun “Penjualan” untuk kredit. Perlu diketahui bahwa setiap transaksi tidak mungkin hanya dimasukkan ke dalam satu akun saja, nanti pasti ada pasangan akunnnya, akun di debet dan akun di kredit, hal ini dikarenakan suatu transaksi pasti akan mempengaruhi akun lain. Jika nanti ada transaksi yang tidak termasuk di dalam suatu transaksi, maka harus digolongkan ke akun baru, beri nama akun dengan nama yang jelas dan dapat diterima. Setelah paham dalam menggolongkan setiap transaksi, yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi asset, hutang, dan modal yang dimiliki saat ini, hal ini dilakukan untuk membuat neraca awal terlebih dahulu sebelum mulai belajar membuat laporan keuangan lebih lanjut. Setelah mencatat semua transaksi yang terjadi dan memposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan

keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan.

3. Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Pemeriksaan Keuangan (Audit)

Pada tahap ini dilakukan penyampaian materi kepada mitra yaitu para anggota Badan Pengawas dari Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Lestari dan anggota Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya. Penyampaian materi dilakukan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) dan pelatihan tentang proses pemeriksaan keuangan, kemudian melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Sebelum dan sesudah penyuluhan dan pelatihan, dilakukan semacam *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta.

Di bawah ini adalah prosedur audit yang dilakukan dalam pemeriksaan keuangan untuk badan usaha koperasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Verifikasi pencatatan sistem akuntansi. Langkah pertama dalam prosedur audit adalah menetapkan dan melakukan verifikasi sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi.
- b. Review dan evaluasi pendahuluan.
- c. Pengujian kepatuhan (*compliance tests*). Pengujian kepatuhan dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan oleh auditor dalam praktiknya sesuai dan berjalan dengan baik. Sifat dari pengujian ini sangat tergantung pada sifat pengendalian, akan tetapi secara esensial pengujian ini meliputi pengecekan transaksi sebagai bukti kepatuhan.
- d. Mencocokkan laporan keuangan sebagai dasar pokok perekaman transaksi. Pada akhir tahun

atau periode, sangatlah penting untuk melakukan pengecekan bahwa rekening-rekening yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan dasar perekaman transaksi yang ada.

- e. Pengujian substantif. Pengujian substantif didesain untuk memperkuat atau membenarkan transaksi dan saldo yang mendasari laporan keuangan.
- f. Analisis menyeluruh.
- g. Pengujian terperinci.
- h. Memastikan kesesuaian kode rekening organisasi.
- i. Memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi.
- j. Pengujian kebenaran dan kejujuran.
- k. Pengujian analitis.
- l. Audit peristiwa setelah tanggal neraca.
- m. Pengujian laporan manajemen.
- n. Surat representasi.
- o. Review partner atau auditor atas kerja audit yang telah dilakukan.

4. Tahap Evaluasi

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, untuk kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemeriksaan Keuangan bagi Anggota Badan Pengawas untuk Meningkatkan Kemandirian Koperasi di Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, disajikan pada Tabel 5.5 di bawah ini. Hasil penyuluhan dan pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam bidang akuntansi sederhana dan pemeriksaan keuangan (audit). Jika dilihat dari perubahan peningkatan pemahaman rata-rata di bidang akuntansi sederhana mengalami peningkatan sebesar 80 % dan untuk bidang pemeriksaan keuangan (audit) mengalami peningkatan sebesar 76%, sehingga rata-rata

prosentase perubahan setelah penyuluhan dan pelatihan akuntansi sederhana dan pemeriksaan keuangan (audit) adalah sebesar 78%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2007. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Akuntan Publik*. Edisi ke Ketiga. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Hariyono. 2003, *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila*, Jurnal Ekonomi Rakyat, II(4).
- Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi*. Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rusidi dan Maman Suratman. 2002. *Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung.
- Winarno, Wing Wahyu, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : STIE YKPN.